

1st Article:

Kesepakatan Bali Terancam Batal

Kesepakatan mencegah perubahan iklim yang telah disetujui dalam COP 13 United Nation Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) tahun lalu di Bali, terancam batal saat negara-negara maju yang tergabung dalam kelompok Annex I mulai kehilangan minat mereka menargetkan reduksi emisi karbon global.

Memasuki hari ketiga konferensi COP 14 di Poznan, Polandia, beberapa negara anggota Annex I mulai menunjukkan keengganan melanjutkan target emisi yang telah disepakati dalam Bali Road Map tahun lalu. Dalam rancangan tersebut, kelompok negara maju sepakat dengan negara-negara berkembang untuk menetapkan target reduksi emisi 25-40% dibawah level 1990 tahun 2020. Kesepakatan ini tadinya diharapkan dapat menjadi jembatan penghubung menuju pertemuan puncak di Kopenhagen tahun depan, untuk menetapkan kesepakatan reduksi emisi karbon pengganti Protokol Kyoto yang akan kadaluarsa tahun 2012.

Keengganan antara lain ditunjukkan delegasi dari Australia, Kanada, Jepang dan Rusia; yang berusaha mengelakkan target pasti penurunan emisi karbon bagi negara-negara maju. Alih-alih mendukung usulan reduksi emisi 80% pada 2050 seperti yang juga didukung Indonesia; negara-negara ini mencoba menetapkan target alternatif yang tidak berdasarkan data sains. Memang tak semua negara-negara Annex I mulai kehilangan minatnya. Uni Eropa (UE) tetap menekankan keseriusan mereka mendanai program-program adaptasi di berbagai negara berkembang, sekalipun kini dunia tengah menghadapi krisis finansial. Namun dilain pihak keberatan UE atas pendanaan 2% dari proyek mekanisme lingkungan bersih (CDM) global juga menimbulkan banyak pertanyaan diantara para delegasi dan membawa perbincangan COP 14 kembali pada tanda tanya besar, apakah mereka dapat memantapkan kesepakatan global mencegah perubahan iklim sebelum pertemuan Kopenhagen tahun depan.

Dilain pihak, semakin banyak negara-negara berkembang yang mulai mendesak ditetapkan target reduksi emisi global. . Indonesia bersama Paraguay menunjukkan kepemimpinan dalam menetapkan target non deforestasi. Paraguay bersedia menetapkan target penghentian total deforestasi pada 2020, sementara Indonesia berkomitmen menghilangkan pembalakan liar secara total di Sumatera pada 2015.

Secara mengejutkan China, yang selama ini kerap dikambinghitamkan oleh Amerika sebagai calon penghasil emisi terbanyak di masa depan, juga memajukan usulan komunitas nasional ramah lingkungan lewat rencana hemat energi pertama di dunia dalam empat tahun kedepan. Ini berarti negeri tirai bambu tersebut bersedia memotong emisi karbon mereka perunit dari Gross Domestic Product hingga 20 persen dari tahun 2006-2010. Selain itu China juga menerapkan kebijakan keras atas pembalakan liar, mendukung penghijauan hutan, manajemen hutan dan penyerapan karbon

UNFCCC Umumkan Kadar Emisi Global Naik

Dua minggu menjelang konferensi perubahan iklim PBB di Poznan, Polandia; United Nations Convention on Climate Change (UNFCCC) mengumumkan emisi rumah kaca yang diproduksi negara-negara industri semakin meningkat. Data UNFCCC menyatakan 40 negara industri yang termasuk dalam Annex I sempat mengalami penurunan gas rumah kaca sebesar 5% dibawah level 1990, namun kembali mengalami peningkatan 2,3 % tahun 2000-2006.

“Kami memerkirakan kenaikan emisi karbon ini disebabkan kenaikan ekonomi di masa itu, dengan meningkatnya industri di Rusia serta negara-negara Eropa Tengah dan Timur selepas Uni Soviet jatuh,” kata Sekretaris Jenderal UNFCCC Yvo de Boer lewat wawancara telepon, mengacu pada transisi ekonomi Eropa era 1990-an saat negara-negara bekas Uni Soviet mulai membuka pasar mereka. Tahun 2000-2006, emisi karbon dunia mendadak meningkat 7,4 % sekalipun kadar emisi negara-negara industri yang meratifikasi Protokol Kyoto masih berada 17 % di bawah batas target emisi.

Data ini menurut de Boer akan membuat pertemuan di Poznan menghadapi tantangan besar. Pertemuan COP14 di UNFCCC tersebut akan menjadi jembatan penghubung menuju pertemuan serupa di Kopenhagen, Denmark tahun depan, yang akan menentukan kesepakatan pengganti Protokol Kyoto.

“Figur ini dikeluarkan karena proses negosiasi PBB di Poznan harus membuat kemajuan yang pasti dan merancang kesepakatan baru untuk mengatasi perubahan iklim,” kata de Boer.

Sekretaris Jenderal UNFCCC tersebut menyatakan krisis finansial di lain pihak dapat mengancam kesepakatan yang telah tercantum dalam Bali Road Map. Tahun lalu konferensi perubahan iklim di Bali telah sepakat menaruh target 25-40 persen dalam catatan kaki Bali Road Map. Namun krisis finansial global membuat Australia mengumumkan potongan anggarannya tahun ini sementara Amerika dan Jerman telah resmi memasuki masa resesi ekonomi. De Boer memerkirakan tuntutan negara-negara industri untuk mengikutkan China dan India memasang target reduksi emisi karbon juga akan lebih meningkat di Poznan nanti.

Indonesia sendiri telah menyiapkan diri lewat pertemuan 17 departemen senin lalu. Deputi Menteri Lingkungan Hidup Masnellyarti Hilman menyatakan Indonesia akan bersikukuh pada apa yang telah disetujui Bali Road Map dan akan melakukan beberapa pertemuan informal pra Poznan dengan negara-negara G77 plus China.

Published in Jurnal Nasional, international page

3rd Article:

Semakin Sulit Terbang ke Eropa

Bumi yang memanas tak cuma sanggup melelehkan es di kutub. Terbang di angkasa pun

akan semakin sulit terimbas perubahan iklim. Atas nama pengurangan emisi karbon, Komisi Uni Eropa (UE) melanjutkan rencana menarik pajak emisi penerbangan udara yang akan berimbas pada semakin mahalnya harga tiket. Tekad UE telah mantap, sekalipun upaya ini banyak menuai kritik dan akan berimbas negatif ke negara-negara berkembang.

Semuanya bermula dua tahun lalu saat UE mencanangkan sistem Perdagangan Emisi Uni Eropa yang berlaku di 27 negara anggotanya. Sistem ini sebenarnya bukan kabar buruk bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia jika saja UE tidak turut memasukkan rencana penarikan pajak penerbangan ke dalamnya.

Industri penerbangan tercatat tak kurang menyumbang 10 kilo ton emisi karbon dioksida ke udara setiap tahunnya di benua Eropa. Sebagai upaya bersih-bersih lingkungan, UE pun memaksa industri penerbangan yang berani mampir untuk memotong emisi karbon 3 % tahun depan dan 5 % pada 2013. Pengurangan emisi karbon ini dihitung lewat pajak, yang dananya akan disalurkan sebagai dana upaya mencegah perubahan iklim.

Ini berarti pajak 5-40 Euro bagi semua penerbangan dari dan ke Eropa. Wanti-wanti agar tak terlalu menangguk protes maskapai, EU menetapkan 75 % dari pajak ini akan dibebankan pada tiket penumpang. Jika masih juga ada maskapai yang nekat melanggar, hadiah penalti yang dapat berujung pada larangan terbang telah menanti.

“Sebenarnya sistem ini akan membuat para penumpang membayar pajak emisi karbon hasil perjalanan mereka ke Eropa, melalui maskapai yang mereka gunakan,” kata Jakob Graichen, analis perdagangan emisi Eropa dari Institusi Ekologi Oko, Jerman.

Kenyataan tetap tak seindah impian. Analisa Graichen menemukan pajak ini dapat berimbas negatif pada industri penerbangan terutama dari negara berkembang. Tiket pesawat antar negara Eropa akan naik 3-6 Euro sementara tiket di luar Eropa akan terimbas naik 15-40 Euro. Industri penerbangan juga diprediksi akan mengalami penurunan selama 1-2 tahun mulai dari 2012, yang akan berbuntut pada melemahnya perdagangan dan pariwisata.

“Tapi akhirnya semua dana pajak ini akan digunakan untuk mengatasi perubahan iklim, dan akan memicu berkembangnya pasar karbon dunia karena maskapai diharuskan membeli sertifikasi karbon,” kata Graichen, mengacu pada sistem pasar karbon Eropa dimana pihak penghasil emisi diharuskan “membeli” sertifikasi seharga 10 Euro per ton karbon.

Meski indah, usulan ini mendapat tentangan negara-negara berkembang, khususnya kelompok negara tertinggal. Maladewa misalnya, khawatir pajak karbon ini hanya semakin mengurangi minat wisatawan berkunjung ke negeri kecil di ujung India ini. Belakangan, negara adidaya Amerika bahkan urun rembuk menolak, khawatir imbasnya pada industri penerbangan mereka yang kini tengah menderita akibat krisis finansial.

Kemana dana pajak akan digunakan juga ikut dipermasalahkan. Komisi Eropa secara resmi hanya bersedia menyatakan dana itu “dapat” dan bukan “pasti akan” digunakan untuk mengatasi perubahan iklim. Di forum konferensi perubahan iklim dunia (UNFCCC) di Poznan, Polandia, sampai akhir UE juga bersikeras tak mau menjelaskan secara detil rencana kemana data itu pergi.

“Jika ada negara-negara lain yang bersedia mengambil aksi yang sama, kami akan segera

menanggapi dan menyesuaikan diri dengan rencana ini,” kata Mark Mayor, anggota Komisi Eropa untuk lingkungan hidup. Menurutnya, rencana ini masih berkisar di lingkup UE sehingga anggota internal sendiri masih berdebat kemana anggaran dana ini akan bermuara. UE juga tak ingin membatasi dana ini hanya untuk mengatasi proyek perubahan iklim negara berkembang saja atau di antara anggota saja.

“Usulan yang kemudian terlontar (dari negara-negara berkembang) adalah pajak bagi penumpang pesawat ini harus berlaku universal dan bukan hanya di Eropa, sehingga setiap orang yang berpergian harus membayar sebagian kecil kontribusinya bagi program adaptasi,” kata Saleemul Huq, pakar dana adaptasi negara-negara berkembang dari International Institute for Environment and Development. Negara-negara tertinggal turut berteriak, mendesak UE bersedia mengucurkan pajak itu ke kantong adaptasi perubahan iklim internasional.

Sayangnya usulan negara-negara berkembang ini tak mendapat tanggapan. Mayor menyatakan usulan tersebut belum resmi diajukan ke UE, sehingga aliansi ini tidak akan bereaksi apapun.

“Sampai kami menerima usulan resmi, saya menolak berkomentar atas usulan itu,” kata Mayor.

Di saat yang sama EU mengacuhkan kenyataan, negara-negara berkembang seperti Malaysia atau Indonesia telah mulai melirik usulan pajak karbon ini. Deputy Menteri Lingkungan Hidup, Masnelyarti Hilman menyatakan usulan tersebut kini telah berada di meja Departemen Keuangan, setelah dibahas bersama antar Departemen Lingkungan Hidup dan Departemen Perhubungan.

“Indonesia pada dasarnya setuju dengan usulan (pajak penerbangan universal). Yang menjadi masalah sekarang adalah berapa besar kisaran pajak itu sendiri untuk memertimbangkan dampaknya pada industri pariwisata dan penerbangan,” kata Masnelyarti. Menurutnya, walaupun usulan ini lolos dari Departemen Keuangan, kisarannya akan jauh lebih kecil dari patokan harga UE. Berusaha memertimbangkan beratnya harga tiket bagi warga sekaligus mendesak UE mengucurkan dana pajaknya bagi adaptasi lingkungan global pada saat yang sama.

Published in Jurnal Nasional, international page

4rd Article:

Terdampar di Jembatan Asia-Eropa

Bumi Turki yang basah tersiram hujan pagi menyapa kedatangan saya. Dini hari musim dingin menawarkan kehangatan 7 derajat celcius, berimbuh mentari yang baru beranjak bangun. Beberapa penumpang nampak enggan beranjak turun pesawat. Penat badan memang tak bisa diingkari purna terguncang di udara selama 13 jam lebih dari Singapura.

Sudi atau tidak, dalam sepuluh jam kedepan saya tetap harus mengakrabi Bandara Antarturk Istanbul ini. Semuanya atas nama visa. Menutup tahun 2008, Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk perubahan iklim (UNFCCC) kembali mengundang saya meliputi pertemuan tahunan mereka di Poznan, Polandia. Alpa menyadari rumitnya selebar ijin masuk berlabel visa, para diplomat Eropa hanya memberi saya waktu kurang dari seminggu untuk melapor ke Kedutaan Polandia di Jakarta. Padahal negeri-negeri Eropa telah sepakat meminta sedikitnya 2 pekan sebelum memberi ijin masuk bagi seorang sipil berpaspor negeri yang kadung dilabeli sebagai tempat kelahiran teroris.

"Lain kali, tolong jangan ajukan visa terlalu cepat begini," kata Maria Lukaszuk, Sekretaris 1 Kedutaan Polandia. Bibirnya tak urung tersenyum lega. Hanya kurang dari 2 jam sebelum pesawat lepas landas, Lukaszuk akhirnya berhasil mendapatkan visa nasional bagi saya. Bahkan satpam kedutaan pun ikut tersenyum senang.

"Jarang-jarang lho, Bu, orang bisa dapat visa secepat ini. Biasanya malah sampai kena tolak 3 kali," kata sang satpam. Dalam diam, saya lirik daftar negara-negara yang tak memerlukan visa untuk menginjak negeri Polska. Malaysia salah satunya. Status tetangga rumpun Melayu itu sebagai anggota koloni Inggris, telah melancarkan segalanya. Sekalipun Malaysia tercatat sebagai negeri pengekspor salah satu otak bom Bali, Nurdin M Top, ke Indonesia. Begitu pula dengan India. Negeri Bombay mantan jajahan Inggris tersebut tak kadung distigma negeri teroris, sekalipun serangan Mumbai bulan lalu menewaskan 180 orang lebih.

"Karena waktunya tak cukup, saya hanya bisa usahakan visa nasional buatmu dan bukan Schengen," kata Lukaszuk, mengacu pada visa uni eropa yang mengijinkan pemegangnya keluar masuk perbatasan 27 negara aliansi itu dengan bebas. Demi selebar visa nasional bagi saya, Lukaszuk sampai rela membuka pintu kantornya meski semua pegawai kedutaan tengah libur Idul Adha. Tanpa bantuan diplomatik dari Lukaszuk, pastilah saya akan gigit jari memandang kepergian pesawat di Soekarno-Hatta.

Namun hanya memiliki visa nasional untuk masuk ke salah satu negeri Uni Eropa tetap mengubah segalanya. Penerbangan yang seharusnya 18 jam ke negeri Polska, harus berlipat menjadi satu hari satu malam. Saya harus terbang ke Singapura terlebih dahulu, untuk menyambung ke Istanbul, Turki sebelum akhirnya landas ke Polandia. Itupun tetap harus menjenguk ibukota Warsawa, karena Poznan, kota tempat pertemuan UNFCCC diadakan tak memiliki bandara internasional.

"Tiket kamu sengaja saya alihkan ke Istanbul dan tidak ke Zurich, karena 12 desember nanti Swiss juga akan masuk wilayah Schengen," tulis Melanie Juengel dari UNFCCC, dalam surat elektroniknya. Visa nasional Polandia memang tak mengijinkan saya transit di Amsterdam atau Munich, dua bandara internasional Uni Eropa yang lazim digunakan sebelum menuju Polandia.

Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Juengel sempat harus mengganti tiket saya 2 kali gara-gara berjibaku rebutan pesawat menuju Singapura. Baru dibukanya Bandara Survanabhumi, Bangkok setelah 8 hari diduduki demonstran sipil, membuat arus penumpang yang tertahan laju serentak menuju negeri gajah putih itu lewat transit Singapura. Sempat saya terancam harus ke Hong Kong terlebih dahulu sebelum ke Polandia, sampai akhirnya Juengel menemukan solusi baru. Solusi terbaik adalah parkir sepuluh jam di Istanbul, Turki, hanya demi menunggu penerbangan 2 jam ke Warsawa. Keluyuran tak tentu di Turki

perlahan terhibur oleh aksi lalu-lalang beraneka etnis di ruang internasional bandara Antarturk.

Seorang wanita mengenakan burqa hitam melintas di depan pohon natal megah kristal Swarovski. Di sampingnya, seorang laki-laki berwajah timur tengah mengangkat telepon selular sambil mengucapkan Assamualaikum keras-keras. Turki yang 99 % berpenduduk muslim ini contoh nyata pertemuan tiga agama besar dunia di benua Eropa. Sekalipun mayoritas muslim sunni, masyarakat Turki tergolong moderat. Wanita Turki bisa mengenakan burqa yang hanya memperlihatkan mata atau malah mengikuti mode barat dengan rok mini.

Letak Turki di jembatan Timur Tengah dan Eropa juga nyata mewarnai bandara internasional negeri anatolian ini. Wajah etnis Kurdi dengan mata khas timur tengah berpadu etnis Turk yang kerap berambut pirang ala Eropa. Mereka berbaur di tengah-tengah penumpang Asia Timur, Eropa bahkan Afrika, yang sedang transit menuju negeri masing-masing.

Tapi berada diantara Benua Asia dan Eropa juga ada tidak enakunya. Turki hingga kini berusaha keras mendapatkan keanggotaan Uni Eropa, sekedar meresmikan identitasnya sebagai salah satu negeri Eropa. Bahkan keikutsertaan negeri dinasti Ottoman ini dalam gelar sepakbola Euro Cup sudah menimbulkan perdebatan dimana-mana. Jejak Eropa di Turki dinilai hanya terlihat pada sebagian kecil wilayah hasil penaklukan dinasti Ottoman di wilayah Yunani. Tak cukup untuk meresmikan keinginan pemerintah Turki untuk diakui sebagai bangsa Eropa, paling tidak hingga kini.

Tak terasa delapan jam telah berlalu di pelataran negeri beridentitas kabur ini. Layar bandara telah menampilkan jadwal penerbangan yang akan membawa saya menuju Warsawa. Di dekatnya terpampang tulisan, " Semoga segera datang kembali ke Istanbul!". Harapan saya membunyah tak sengaja. Semoga saja bisa kembali ke jembatan Asia Eropa ini dan tidak hanya untuk parkir di pelatarannya.